

Volume 2 Nomer 1, Januari 2024

STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI STUDI PADA KPP PRATAMA WONOSARI

Ajeng Widha Irfana, Priyastiwi Priyastiwi

UPAYA PENINGKATAN PERAN PUSDALOPS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

Budi Santoso, Muda Setia Hamid

UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN

Chadaryati Chadaryati, Nur Widiastuti

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DENGAN METODE BALANCE SCORECARD DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS GEMARANG NGAWI TAHUN 2018

Dian Widianingrum, Wahyu Purwanto

PERAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Fararizqa Heranita, Jazuli Akhmad

UPAYA PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) KABUPATEN TEMANGGUNG

Fransiska Dian Mayasari, Uswatun Chasanah

PENGARUH KEPEMIMPINAN, MUTASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

Much Fachrudin, Syeh Assery

PENGARUH KOMPETENSI KERJA, LOYALITAS KERJA, DISIPLIN KERJA DAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP KINERJA KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

Muhammad Fuad Hadiyanto, Meidi Syaflan

PENGARUH TUNJANGAN KINERJA, PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPERIBADIAN PEGAWAI SEBAGAI VARIABEL MODERASI Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Ratih Widi Astuti, Muhammad Mathori

UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI UNIT RESKRIM POLSEK SAMIGALUH POLRES KULONPROGO

Yekti Tri Utami, Muhammad Awal Satrio Nugroho

UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Tutik Ani Trisnamurti, Suci Utami Wikaningtyas

HOME / ARCHIVES / Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia

Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.32477/jrima.v2i1>

PUBLISHED: 2024-02-02

ARTICLES

STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI STUDI PADA KPP PRATAMA WONOSARI

Ajeng Widha Irfana , Priyastwi Priyastwi 1 – 17



UPAYA PENINGKATAN PERAN PUSDALOPS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

Budi Santoso , Muda Setia Hamid 18 – 37



UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN

Chadaryati Chadaryati, Nur Widiastuti 38 – 49



ANALISIS KINERJA PEGAWAI DENGAN METODE BALANCE SCORECARD DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS GEMARANG NGAWI TAHUN 2018

Dian Widianingrum, Wahyu Purwanto 50 – 72



PERAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Fararizqa Heranita , Jazuli Akhmad 73 – 91



UPAYA PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) KABUPATEN TEMANGGUNG

Fransiska Dian Mayasari , Uswatun Chasanah 92 – 109



PENGARUH KEPEMIMPINAN, MUTASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

Much Fachrudin , Syeh Assery 110 – 130



PENGARUH KOMPETENSI KERJA, LOYALITAS KERJA, DISIPLIN KERJA DAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP KINERJA KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

Muhammad Fuad Hadyanto, Meidi Syaflan 131 – 149



PENGARUH TUNJANGAN KINERJA, PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPERIBADIAN PEGAWAI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates 150 – 171



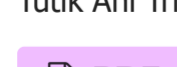
UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI UNIT RESKRIM POLSEK SAMIGALUH POLRES KULONPROGO

Yekti Tri Utami, Muhammad Awal Satrio Nugroho 187 – 204



UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Tutik Ani Trisnamurti , Suci Utami Wikaningtyas 172 – 186



Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS



UPAYA PENINGKATAN PERAN PUSDALOPS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG

**Budi Santoso (BPBD Kota Magelang)¹,
Muda Setia Hamid (STIE WW)²**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang. Penelitian dilakukan mulai Oktober 2022. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data wawancara dan observasi. Analisis data Model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Pusdalops dalam Penanggulangan Bencana di BPBD Kota Magelang belum optimal disebabkan: masih kurang sosialisasi, pembinaan, pengetahuan, pembagian tugas yang kurang jelas, pemberian informasi kurang cepat, belum jelasnya nomor kontak yang dapat dihubungi, kurangnya koordinasi dan terbatasnya sarana dan prasarana maupun personil. 2) Upaya untuk meningkatkan peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang adalah: memberikan pelatihan dasar manajemen bencana, pengolahan dan penyajian data, komunikasi dan teknik press release, kejelasan dari atasan terkait pembagian tugas dan wewenang, peningkatan sarana dan prasarana serta personil, mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, koordinasi antara Pemerintah Kota Magelang dan BPBD Kota Magelang untuk memberikan anggaran, memberikan kejelasan mengenai kontak yang dapat dihubungi, peningkatan komunikasi yang baik antara Pusdalops dan satgas lapangan serta TRC.

Kata Kunci: Penanggulangan, Bencana, Pusdalops.

Abstract

This research aims to increase the role of Pusdalops in disaster management at BPBD Magelang City. Research was conducted starting in October 2022. This type of research is descriptive qualitative. Collection of interview and observation data. Miles & Huberman Model data analysis. The results showed that: 1) The role of Pusdalops in Disaster Management at the BPBD in Magelang City was not optimal due to: lack of socialization, coaching, knowledge, unclear division of tasks, providing information not fast enough, unclear contact numbers to contact, lack of coordination and limited facilities and infrastructure and personnel. 2) Efforts to increase the role of Pusdalops in disaster management at BPBD Kota Magelang are: providing basic disaster management

training, processing the presentation of communication data and press release techniques, clarity from superiors regarding the division of tasks and authorities, improving facilities and infrastructure and personnel, supporting policies government policies, coordination between the City Government of Magelang and BPBD Kota Magelang to provide budget, provide clarity regarding contacts to contact, improve good communication between Pusdalops and the field task force and TRC

Keywords: Disaster Management, Pusdalops.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis dikelilingi oleh dua benua yaitu benua Asia dan daratan Australia menjadikan Indonesia sebagai letak yang strategis, namun posisi Indonesia berada pada zona tiga lempeng menyebabkan Indonesia memiliki deretan gunung api yang disebut '*ring of fire*'. Akibatnya, Indonesia memiliki wilayah yang subur karena memiliki tanah vulkanik akibat aktivitas vulkanik (Kusumaningrum, 2018).

Namun dari keunggulan wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat berbagai macam potensi risiko bencana. Secara geografis, sebagian besar wilayah Indonesia terletak di daerah rawan bencana, baik bencana yang sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan bencana kontemporer. (Kusumaningrum, 2018). Sedangkan potensi bencana adalah bencana yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam generasi sekarang, menyebabkan kekeringan dan perusakan keanekaragaman hayati, degradasi lahan dan kelaparan sistem generasi yang akan datang. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh gejala alam, baik yang ada di dalam perut bumi maupun yang disebabkan oleh cuaca dan perubahan iklim.

Implementasi penanggulangan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Pasolong, 2010).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 yang merupakan gubahan dari Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Magelang No mor 51 Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam rangka penanggulangan bencana tidak lepas dari program dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Penanggulangan Bencana di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai sumber penyedia data kejadian bencana, pusat komunikasi dan pusat kordinasi. Peran Pusdalops sama pentingnya dengan petugas di lapangan, kedepannya diharapkan ada petugas pusdalops yang fokus untuk mengolah data, data tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat.

Data merupakan jantung dalam upaya penanggulangan bencana, tanpa data upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan dengan baik. Lebih jelasnya berikut rekapitulasi kejadian bencana tiga bulan awal pada BPBD Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kejadian Bencana di BPBD Kota Magelang Tahun 2022

Bulan Januari

No	Jenis bencana	Jmh Laporan	Jmh Penanganan	Keterangan
1	Pohon Tumbang			
2	Tanah Longsor	8	8	4 terlambat penanganan
3	Angin kencang/puting beliung	1	1	
4	Banjir	2	2	
5	Kebakaran Rumah	1	1	

Bulan Februari

No	Jenis bencana	Jmh Laporan	Jmh Penanganan	Keterangan
1	Pohon Tumbang			
2	Tanah Longsor			
3	Angin kencang/puting beliung	3	3	
4	Banjir			
5	Kejadian Lainnya	1	1	

Bulan Maret

No	Jenis bencana	Jmh Laporan	Jmh Penanganan	Keterangan
1	Pohon Tumbang			
2	Tanah Longsor			
3	Angin kencang/puting beliung	40	40	23 terlambat penanganan
4	Banjir			
5	Kebakaran Rumah			
6	Kejadian Lainnya	1	1	

Sumber: BPBD Kota Magelang (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan banyaknya kejadian bencana di Kota Magelang. Dari data di atas disebutkan bahwa semua kejadian bencana telah ditangani oleh BPBD Kota Magelang namun demikian peran Pusdalops dalam proses penanganan ini belum maksimal dikarenakan Pusdalops BPBD Kota Magelang belum dapat memberikan informasi terkait bencana dengan cepat dan tepat. Belum cepatnya pemberian informasi kepada petugas penanggulangan bencana inilah yang kemudian membuat proses penanganan kejadian bencana menjadi lebih lama. Masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari Posdalops ini yaitu masih belum tercukupinya sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPBD Kota Magelang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di BPBD Kota Magelang maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: belum optimalnya peran pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka diberikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa peran pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang belum optimal?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang?

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde (1997) Teori dalam Administrasi Publik adalah rangkaian ide mengenai bagaimana dua variabel atau lebih berhubungan. Terdapat beberapa kelompok teori dalam administrasi negara, diantaranya : teori normatif, yaitu teori yang bertujuan menjelaskan situasi masamendatang, idealnya dari suatu

kondisi. Misalnya teori tentang kepemimpinan ideal masa depan, prakiraan cuaca dan iklim.

Ada beberapa isu atau permasalahan penting yang sering dibahas dalam ilmu administrasi negara antara lain:

1. Pelayanan publik

Administrasi publik sebagai proses administrasi for publik, pada hakekatnya adalah memberi pelayanan publik.

2. Motivasi Pelayanan Publik

Dalam masalah ini isu terpenting adalah membahas motivasi seperti apa yang dimiliki oleh administrator dalam memberikan pelayanan publik. Ada yang berdasarkan norma, rasional dan perasaan.

3. Maladministrasi

Maladministrasi merupakan kesalahan dalam praktek administrasi. Pembahasan teori administrasi publik juga akan membahas masalah kesalahan-kesalahan tersebut sebagai kajian utama, seperti lambannya birokrasi, rutinitas dan formalitas pelayanan.

4. Etika Administrasi Publik

Masalah penting lainnya dalam administrasi publik adalah etika administrasi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah nilai baik dan buruk. Apakah pelayanan atau prosedur administrasi publik dinilai baik atau buruk oleh masyarakat.

5. Kinerja dan Efektivitas

Administrasi sebagai proses mencapai tujuan, maka persoalan pencapaian dan cara mencapai tersebut menjadi penting. Oleh karena itu bagaimana cara kerja (kinerja) yang dijalankan apakah sudah baik sehingga tujuan dapat tercapai (efektif).

6. Akuntabilitas Publik

Administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga. Ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikontrol, diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga/publik. Hal tersebut merupakan masalah pokoknya.

Peranan

Peranan adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

a) Persepsi Peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (*role perception*).

b) Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (*role expectation*) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi.

c) Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (*role conflict*).

Dasar Hukum Penanggulangan Bencana

Undang-Undang NO. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu terdapat pada Pasal 35 penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a meliputi:

- a) Perencanaan penanggulangan bencana;
- b) Pengurangan resiko bencana;
- c) Pencegahan
- d) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e) Persyaratan analisis resiko bencana;
- f) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g) Pendidikan dan pelatihan, dan
- h) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; pasal 36

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana:

- a. Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri Pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dari ancaman dari suatu kejadian bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia;
- b. Bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi, dan menyeluruh baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;

- c. Bahwa peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan penjabaran lebih lanjut dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang penanggulangan bencana

Manajemen Penanggulangan Bencana

Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana (Arsyad, 2017).

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007).

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

(1) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup; (2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban; (3) Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman; (4) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana; (5) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut; (6) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Tahapan Manajemen Bencana

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau prabencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi:

a. Kesiagaan

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

b. Peringatan Dini

Langkah lainnya yang perlu dipersiapkan sebelum bencana terjadi adalah peringatan dini. Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai.

c. Mitigasi Bencana

Menurut peraturan pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Teknis

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya:

- a. Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa.
- b. Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api.
- c. Membuat rancangan teknis pengaman, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

2. Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Pendekatan Administratif.

3. Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi sebagai contoh:

- a. Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana.
 - b. Sistem perijinan dengan memasukan aspek analisa risiko bencana.
 - c. Menerapkan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi.
 - d. Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan.
 - e. Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi.
4. Pendekatan Kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berfikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya.

Saat Kejadian Bencana

Tahapan paling krusial dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana sesungguhnya terjadi.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

a) Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana (*response*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Menurut PP No. 21 tahun 2008, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya.
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana. Berdasarkan penilaian awal dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat.

b) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, langkah berikutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

(a) Pemenuhan kebutuhan dasar;

Dalam kondisi bencana, kemungkinan besar semua sarana umum, sanitasi dan logistik mengalami kehancuran atau sekurangnya terputus. Untuk itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memberikan layanan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan.

(b) Perlindungan terhadap kelompok rentan

Salah satu prioritas dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok yang dikategorikan rentan, misalnya anak-anak, orang tua, cacat, pasien di rumah sakit, dan kaum lemah lainnya. Mereka perlu dibantu terlebih dahulu dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman sehingga tidak menambah jumlah korban bencana.

(c) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Tim tanggap darurat juga bertugas untuk segera memulihkan kondisi prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti saluran air minum, listrik, dan telepon. Sarana vital ini sangat menentukan dalam mendukung upaya pemulihan dan penyelamatan korban bencana.

c) Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian.

Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Definisi *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility menurut Ahmad Lamo Said (2018:23) adalah sebagai berikut: “Sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata public dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Menurut Nurlela (2019:11) *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut: “CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.”

Sedangkan menurut Rusmana et al (2019:72) *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut: “Merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan dampak negatif yang dilakukan perusahaan.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2018) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan Sugiyono (2017), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. Waktu penelitian pada bulan November 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Moleong (2018:132) subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang

diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Subjek penelitian menurut Arikunto (2013:152) merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian ini adalah personil Pusdalops.

Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2013) instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Pada pendekatan kualitatif penekanan pemilihan informannya didasarkan pada kualitas informasi yang akan disampaikan bukan pada jumlah informannya. Ketepatan dalam memilih informan merupakan salah satu kunci keberhasilan penelitian kualitatif.

Sedangkan teknik pemilihan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang.
- 2) Kabid Kedaruratan BPBD Kota Magelang
- 3) Staf Pelaksana di Bidang Kedaruratan BPBD Kota Magelang sebanyak 3 orang
- 4) Korban bencana 3 orang

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer diambil secara langsung dari lokasi penelitian melalui Wawancara (*Indepth Interview*) kepada responden.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- 1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.

2) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2019).

Analisis Data Model Miles & Huberman

Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu penelitian atau setelah kembali, kemudian dilakukan analisis. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis dengan menggunakan model Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2019) terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu *deskriptif* dan *reflektif*. Catatan *deskriptif* adalah catatan yang diperoleh secara alami, tentang hasil penglihatan, didengar atau yang dipahami sendiri tanpa adanya pendapat dan penafsiran. Catatan *reflektif* adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan penafsiran tentang temuan yang didapat dan menjadi rencana pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

3. Penyajian data

Penyajian data dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti pada proses reduksi data. Setelah data terkumpul dan memadai selanjutnya dapat diambil kesimpulan sementara, dan setelah betul-betul lengkap dan akurat baru bisa diambil kesimpulan akhir.

Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2018). Triangulation menurut Patton (Moleong, 2018) dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

2) Triangulasi Metode

Menggunakan dua strategi; (1) pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3) Triangulasi Peneliti

Memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pengambilan data dilakukan oleh beberapa orang.

4) Triangulasi Teori

Melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Objek Penelitian

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB/ BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Pusdalops sendiri terletak di BPBD yang beralamat di Jl. Lamtoro No 71, Tidar Baru, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah 56126.

Visi dan Misi

1. Pusdalops Penanggulangan Bencana yang dibentuk memegang kuat prinsip: cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel;
2. Pusdalops BNPB bertekad untuk menjadi Pusat Pengendalian Operasi/Emergency Operation Center (EOC) berkelas dunia (Word Class EOC);
3. Keberadaan Pusdalops PB sangatlah penting, Pusdalops PB di daerah, ibarat mata dan telinga serta tangan kanannya Kepala Daerah;
4. Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasi, Pusdalops BNPB bekerjasama dengan Pusdalops BPBD seluruh Indonesia serta pihak-pihak lain yang terlibat baik dalam proses pertukaran informasi maupun keterpaduan rencana operasi.

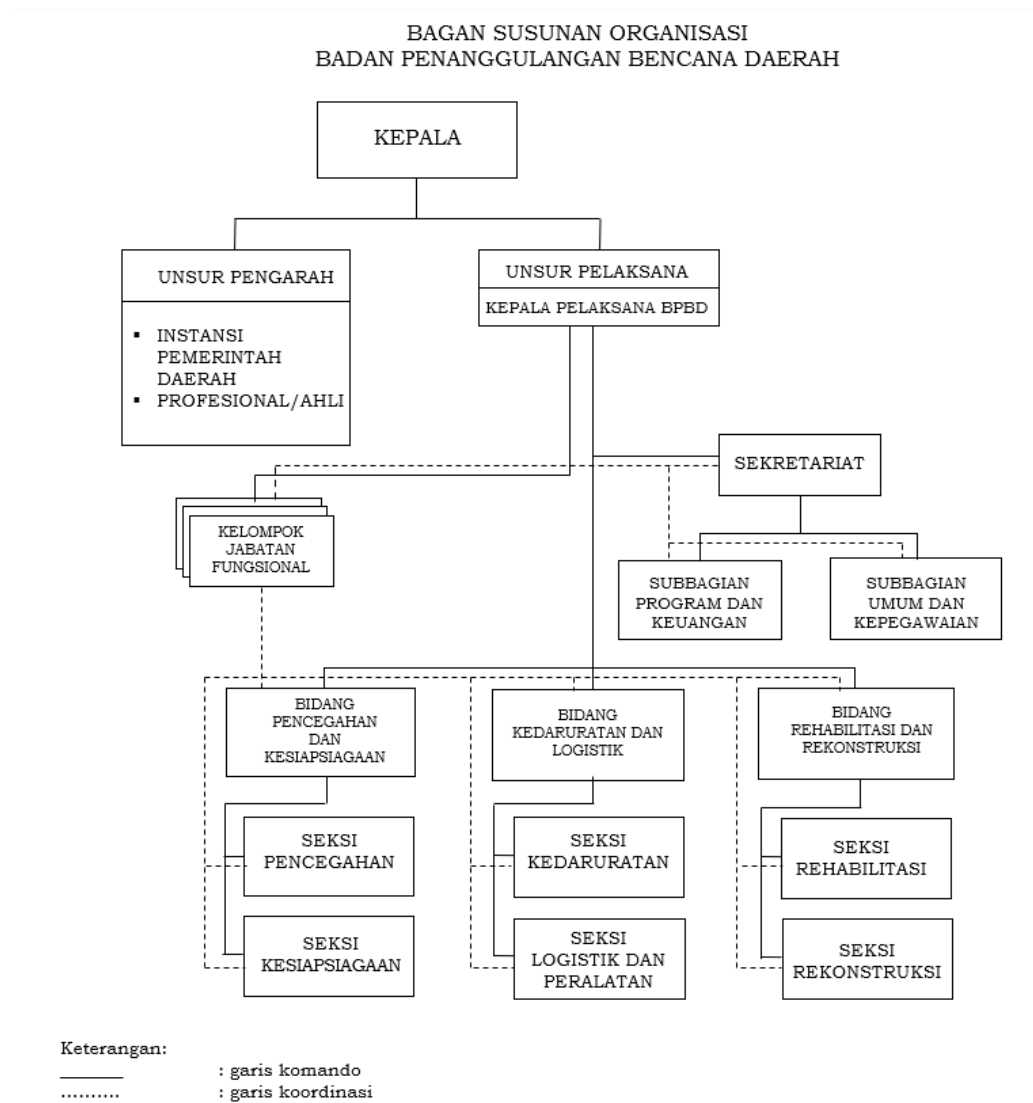
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Struktur organisasi dibuat dengan tujuan utamanya adalah supaya organisasi lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah organisasi.

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Magelang



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Magelang (2023)

Job Description

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 293, Peraturan BNPB No.04 Tahun 2019 dan Peraturan BNPB No.8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BNPB No.4 Tahun 2019), Pusat Pengendalian Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;
- b. Penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
- c. Penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- d. Penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana; dan
- e. Penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor.

Bidang Dukungan kaji Cepat dan Perencanaan Operasi:

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, penyusunan, pengolahan data, analisis potensi ancaman bencana dan rekomendasi rencana operasi.

Fungsi:

- a. Penyusunan bahan dukungan perencanaan operasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;
- c. Penyusunan rekomendasi dukungan operasi; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang dukungan kaji cepat dan perencanaan operasi.

Bidang Dukungan Kaji Cepat dan Perencanaan Operasi terdiri dari:

- a. Sub. Bidang Dukungan Kaji Cepat Operasi: Mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengolahan, analisis situasi dan diseminasi informasi darurat bencana.
- b. Sub. Bidang Perencanaan Operasi: Mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, perencanaan operasi penanganan darurat bencana.

Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi:

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, penyusunan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi operasi penanggulangan bencana.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengendalian operasi;

- b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi operasi;
- c. Penyiapan informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaan; dan
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis laporan di bidang pengendalian taktis dan evaluasi operasi.

Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi terdiri dari:

- a. Sub. Bidang Pengendalian Taktis Operasi: Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan pengendalian operasi, informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaan.
- b. Sub. Bidang Evaluasi Operasi: Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi pelaksanaan operasi, informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaan.
- c. Sub. Bagian Tata Usaha:
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, arsip dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Peran Pusdalop Dalam Penanggulangan Bencana Di BPBD Kota Magelang Belum Optimal.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menggali pertanyaan dari informan tentang peran Pusdalop dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang saat ini.

Peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang masih belum optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan, apabila dilihat dari pembagian tugas dan fungsi masih kurang sesuai dengan kapasitas anggota, masih mengalami kekurangan personil dan Pelaporan informasi yang masih lamban.

Faktor Penyebab Peran Pusdalops Dalam Penanggulangan Bencana di BPBD Kota Magelang Belum Optimal.

Bahwa faktor penyebab peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang belum optimal: masih kurang sosialisasi dan pembinaan, kurangnya pengetahuan, pembagian tugas yang kurang jelas, pemberian informasi masih kurang cepat dan belum sesuai dengan harapan masyarakat, belum jelasnya nomor kontak yang dapat dihubungi, kurangnya koordinasi dan terbatasnya sarana dan prasarana maupun personil.

Upaya Untuk Meningkatkan Peran Pusdalops Dalam Penanggulangan Bencana di BPBD Kota Magelang.

Upaya untuk meningkatkan peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang yaitu: memberikan pelatihan dasar manajemen bencana, pengolahan penyajian data komunikasi dan teknik press release, kejelasan dari atasan terkait pembagian tugas dan wewenang, peningkatan sarana dan prasarana serta personil, mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, Koordinasi antara Pemerintah Kota Magelang dan BPBD Kota Magelang untuk memberikan anggaran, memberikan kejelasan mengenai kontak yang dapat dihubungi, peningkatan komunikasi yang baik antara Pusdalops dan satgas lapangan serta TRC.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- 1) Peran Pusdalops dalam Penanggulangan Bencana di BPBD Kota Magelang belum optimal hal ini disebabkan oleh :
 - a. Masih kurang pengetahuan sosialisasi dan pembinaan,
 - b. Pembagian tugas yang kurang jelas,
 - c. Kurangnya sarana, prasarana serta personil,
 - d. Pemberian informasi masih kurang cepat dan belum sesuai dengan harapan masyarakat,
 - e. Belum jelasnya nomor kontak yang dapat dihubungi,
 - f. Kurangnya koordinasi dengan tim penanggulangan bencana.
- 2) Upaya untuk meningkatkan peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang adalah :
 - a. Memberikan pelatihan dasar manajemen bencana, pengolahan penyajian data, komunikasi dan teknik press release,
 - b. Kejelasan dari atasan terkait pembagian tugas dan wewenang,
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana serta personil,
 - d. Mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, koordinasi antara Pemerintah Kota Magelang dan BPBD Kota Magelang untuk memberikan anggaran,
 - e. Memberikan kejelasan mengenai kontak yang dapat dihubungi,

- f. Peningkatan komunikasi yang baik antara Pusdalops dan satgas lapangan serta TRC.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana di BPBD Kota Magelang masih perlu ditingkatkan untuk itu disarankan sebagai berikut:

1. Kepala BPBD Kota Magelang disarankan memberikan pelatihan dasar manajemen bencana, pengolahan penyajian data, komunikasi dan teknik press release kepada personil Pusdalops.
2. Kepala BPBD Kota Magelang disarankan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Magelang untuk memberikan anggaran dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Pusdalops.
3. Kepala BPBD Kota Magelang disarankan membuat *job description* terkait pembagian tugas dan wewenang para anggota Pusdalops untuk mempermudah anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Lamo Said. (2018). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif. Governance. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, K.M. (2017). Manajemen Penanggulangan Bencana. Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- David, Berry. (2003). Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriyan, Irvan dan Dyah Hariani (2015). Analisis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Indonesian Journal Of Public Policy and Mangement Review.
- Jay, M. Shafritz dan Albert C. Hyde. (1997). Classic of Public Administration. Harcourt Brace College Publishers. Florida.
- Kusumaningrum, Prasetyo, Budi. (2018). Ulasan Kritis Tentang Teori Biogeografi Pulau. Universitas Terbuka Repository.
- Lomban dkk. (2022). Komunikasi Risiko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) dalam Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana. Jurnal Nusantara Vol. 9 (2).
- Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nurjanah. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.

- Nurlela W. (2019). Model Corporate Social Responsibility (CSR). Jawa Timur: Myria Publisher.
- Octavia, Mila. (2017). Peran Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) BPBD Kota Cilegon dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Cilegon. *Jurnal Repository Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. Vol 12. (1).
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Tanggap Darurat Bencana.
- Prakoso, Muhammad, Ivan. (2022). Kinerja Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-Pb) Dalam Pengelolaan Data Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Malang. Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rusmana, Agus et al. (2019). The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi Organisasi. Bandung: Media Akselerasi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, S., Sulastiningsih, S., Chasanah, U., Widiastuti, N. and Purwanto, W. (2023) "The Relationship of Leadership, Discipline, Satisfaction, and Performance: A Case Study of Steel Manufacture in Indonesia", *International Journal of Professional Business Review*. São Paulo (SP), 8(2), p. e01146. doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i2.1146.
- Syafril, Sinta. (2019). Analisis Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 6, Nomor 1.
- Undang- Undan N0. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Wikaningtyas, S. U., Tjahjono, H. K., & Suprihanto, J. (2023). Turnover Intention Model: Self -Determination Theory Approach. *Quality - Access to Success*, 24(194). <https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.20>

HOME / Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief:



Sulastiningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Managing Editor:



Beta Asteria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Editorial Board:



John Suprihanto

Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus



H.M. Awal Satrio

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus



Suhartono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus



Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Publication and Content Editor:

Agung Slamet Prasetyo
Siti Khotimah

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

Zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS

